

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 64/DJPT.6/RC.610/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025 beserta data dukungnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mahrus

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

2025



LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN IV

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan periode Triwulan IV Tahun 2025 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja Yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terimakasih.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan



Mahrus

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	8
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR TIM KERJA	9
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	RENCANA STRATEGIS	14
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	15
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	15
2.4	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KNMP TAHAP I TAHUN 2025.....	18
BAB 3	AKUNTABILITAS KERJA	
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
3.2.1	PENGELOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	30
3.2.2	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN EKONOMI NELAYAN MELALUI FASILITAS PENGUATAN USAHA	39
3.2.3	TERWUDUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	49
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	49
BAB 4	PENUTUP	
4.1	KESIMPULAN	50
4.2	SARAN	52

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 2	Rencana Kinerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025
TABEL 3	Rencana Aksi IKU Tahun 2025
TABEL 4	Progres Capaian Pembangunan KNMP (Tahap I)
TABEL 5	Capain Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025
TABEL 6	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya
TABEL 7	Tabel Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya
TABEL 8	Persentase Nelayan yang Terfasilitasi Pengembangan Usahanya
TABEL 9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Nelayan yang Terfasilitasi Pengembangan Usahanya
TABEL 10	Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan
TABEL 11	Capaian Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan (orang)
TABEL 12	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan (orang)
TABEL 13	Kampung Nelayan yang Dikembangkan dan Difasilitasi Penataannya
TABEL 14	Persentase Nelayan yang Terlindungi
TABEL 15	Perbandingan Capaian Persentase Nelayan yang Terlindungi
TABEL 16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Nelayan yang Terlindungi
TABEL 17	Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang dikembangkan
TABEL 18	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 20	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
TABEL 21	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 22	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025, Berdasarkan Jenis Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 Bagan Struktur Tim Kerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- GAMBAR 2 Dashboard Capaian Aplikasi Kinerjaku
- GAMBAR 3 Operasional Unit Usaha KDMP Syariah Gampong Kuala Raja
- GAMBAR 4 Model Kemitraan KDMP Syariah Gampong Kuala Raja
- GAMBAR 5 Operasional Unit Usaha KDMP Warloka
- GAMBAR 6 Model Kemitraan KDMP Warloka
- GAMBAR 7 Operasional Unit Usaha KDMP Sorue Jaya
- GAMBAR 8 Model Kemitraan KDMP Sorue Jaya
- GAMBAR 9 Operasional Unit Usaha KDMP Lateng
- GAMBAR 10 Model Kemitraan KDMP Lateng
- GAMBAR 11 Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan IV Tahun 2025
- GAMBAR 12 Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, terbentuk berdasarkan Kepmen KP No.2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.629.000.000,-** yang tertuang pada DIPA Tahun 2025 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2025 Tanggal 02 Desember 2024, namun setelah melalui revisi anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp **1.125.051.054.000**. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025, mengalami penambahan Sasaran Kinerja menjadi 3 Sasaran Kerja serta didukung oleh 10 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2025	Triwulan IV	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	56	124
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	113	113
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5000	2283	45,6
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	100	100	100
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	127,3	127,3
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	6	Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)	4	4	100
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	87	81,34	93,5
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88	89,55	101,76
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85	0	0
		10	Persentase penverapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98	90	91,8

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar **91,12 %** hasil dari pengukuran ini dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan periodik.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia meluncurkan program strategis nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran ini menandai dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan, sebagai wujud nyata dari Asta Cita ke-6: membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Program ini didasarkan pada:

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
- b. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kopdeskel Merah Putih.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitas kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah, pemasar ikan,

petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih. Serta mendorong koperasi sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi koperasi desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi merah putih sektor kelautan dan perikanan merupakan penumbuhan koperasi baru, pengembangan koperasi aktif, serta Revitalisasi koperasi tidak aktif.

Tujuan utama Kopdeskel Merah Putih adalah membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan serta akses layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Kopdeskel Merah Putih bukan sekadar koperasi, melainkan gerakan nasional kemandirian ekonomi rakyat. Dengan pendekatan gotong royong, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan, koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan triwulan IV tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR TIM KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang

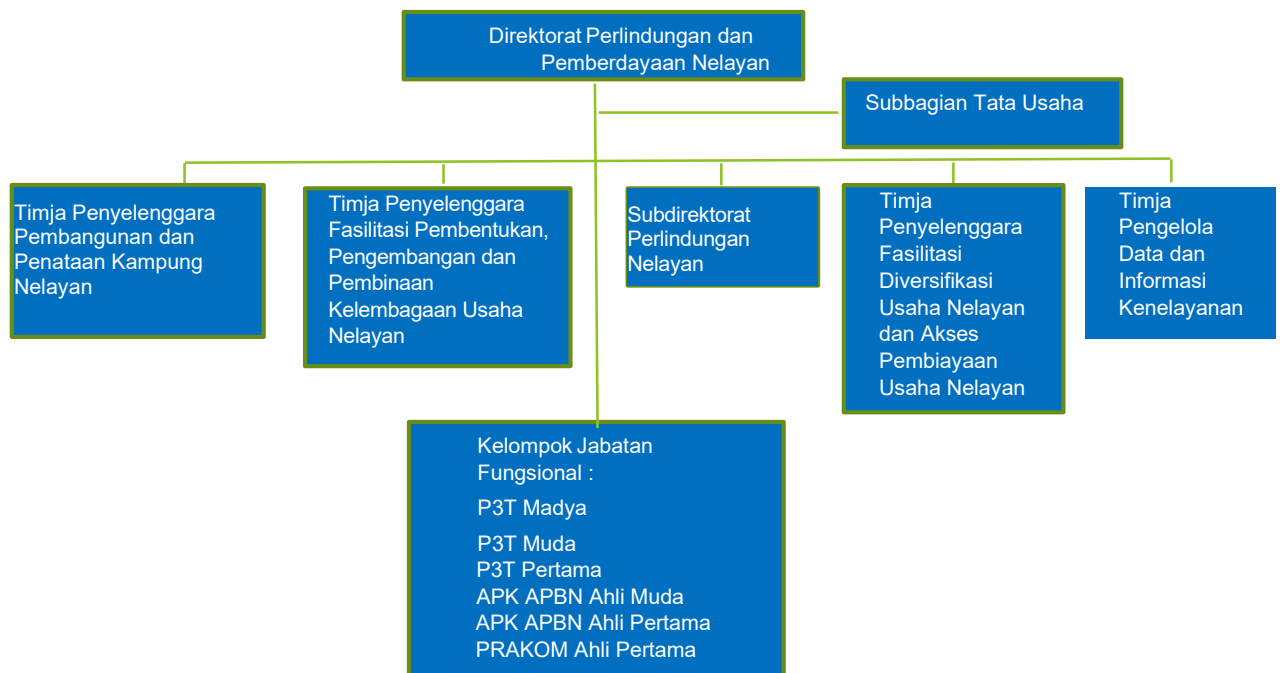
dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan ; dan

6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Adapun susunan Tim Kerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Subdirektorat Perlindungan Nelayan**
- b. **Subbagian Tata Usaha**
- c. **Tim Kerja Penyelenggara Fasilitas Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan**
- d. **Tim Kerja Penyelenggara Fasilitas Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan**
- e. **Tim Kerja Penyelenggara Fasilitas Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan**
- f. **Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Ahli Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Ahli Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional PRAKOM Ahli Pertama



Gambar 1. Bagan Struktur Tim Kerja Dit. PPN

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan triwulanan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan

pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari Upaya mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, Pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengurangan ketimpangan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama Pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi struktural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi. (2) Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan Tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2026. (3) Pengembangan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Perindungan dan Pemberdayaan Nelayan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Sektor kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

1.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2024 – 2029, berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025.

1.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja.

Tabel 2. Rencana Kinerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET 2025
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE					
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000	
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	100	
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	6	Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)	4	
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE					
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	87	
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88	
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85	
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98	

Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini. Rencana Kinerja Dit. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1 Penyusunan / revidi juknis kelembagaan nelayan
		2 Sosialisasi dan identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi nelayan)
		3 Supervisi dan evaluasi penguatan kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi)
		4 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui Lembaga keuangan
		5 Persiapan dan langkah strategis pembentukan KNMP
		6 Sosialisasi dan pendampingan pembentukan KNMP
		7 Pendataan identitas KNMP
		8 Koordinasi dan pelaporan hasil verifikasi KNMP

2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	1 Perencanaan dan evaluasi kelembagaan ekonomi nelayan (Korporasi) 2 Pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan Nelayan
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1 Tingkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan , 2 Memberikan kesempatan kepada pegawai lingkup Dit. PPN untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar. 3 Melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP 4 Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. PPN 5 Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 6 Melaksanakan tindak lanjut dari setiap hasil temuan pengawasan 7 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan 8 Mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran

1.4 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHAP I TAHUN 2025

1. Pembangunan KNMP tahap I T.A. 2025 telah dilaksanakan sebanyak 65 lokasi, dengan 3 lokasi KNMP telah selesai pembangunannya, yaitu Desa Banagan – Kabupaten Toli-Toli, Desa Anaiwoi – Kabupaten Kolaka, dan Desa Leato Selatan – Kota Gorontalo. Adapun rata-rata perkembangan nasional progres fisik KNMP telah mencapai 75,51%, dengan rincian capaian yaitu 3 lokasi 100%, 7 lokasi 90 - <70%;
2. Secara umum, beberapa kendala yang berdampak signifikan terhadap proses pembangunan KNMP, yaitu meliputi:
 - a. keterbatasan pasokan material di lokasi pembangunan;
 - b. kondisi cuaca yang didominasi oleh curah hujan tinggi seringkali menghambat aktivitas konstruksi;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi berkualitas masih sangat terbatas;
 - d. kondisi lahan pembangunan tergolong kurang memadai, sehingga membutuhkan penanganan tambahan;
 - e. aksesibilitas lokasi pembangunan cukup sulit, sehingga menghambat mobilitas material;
 - f. masih ditemukan konflik horizontal di sekitar lokasi pembangunan.
3. Secara khusus, kendala yang cukup serius dalam proses pembangunan KNMP sebagai berikut:
 - a) Terjadinya bencana alam di Sumatera yang secara signifikan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan di 4 lokasi KNMP di Provinsi Aceh dan 2 lokasi KNMP di Provinsi Sumatera Barat karena terputusnya akses transportasi pengiriman barang dan material, minimnya pasokan barang dan material, dan berkurangnya tenaga kerja. Secara rinci progres capaian pembangunan KNMP di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana per 4 Januari 2026 tersaji pada tabel berikut:

No.	Provinsi	Kab./Kota	Desa/Kelurahan	Capaian Fisik (%)
1.	Aceh	Bireuen	Kuala Raja	74,22%
2.	Aceh	Aceh Barat Daya	Lhok Pawoh	70,34%
3.	Aceh	Aceh Utara	Lancok	60,32%
4.	Aceh	Kota Langsa	Birem Puntong	36,77%
5.	Sumatera Barat	Padang Pariaman	Katapiang	75,16%
6.	Sumatera Barat	Kota Padang	Padang Sarai	70,48%

Tabel. 4 Progres Capaian Pembangunan KNMP (Tahap I)

- b) Pembangunan **KNMP Desa Ujung Said, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat**, sebagian besar bahan material dan barang utama berasal dari luar Kabupaten Kapuas Hulu. Transportasi material dan barang utama dilakukan melalui jalur Sungai Kapuas (waktu tempuh dari Pontianak-Kapuas Hulu $\pm$ 2 minggu), atau transportasi darat $\pm$ 18 jam (Pontianak-Jongkong) lanjut Jongkong-Ujung Said sekitar $\pm$ 1 jam melalui sungai Kapuas. Hal ini menyebabkan progres capaian fisik pembangunan KNMP di Desa Ujung Said per 4 Januari 2026 baru mencapai **36,53%**;
 - c) Pembangunan **KNMP Mudakaputu, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, dilaporkan mengalami kendala berupa blokade dari pemilik lahan dikarenakan belum adanya ganti rugi dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan adanya penundaan pekerjaan di lapangan. Terhadap hal ini Ditjen Perikanan Tangkap telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penyelesaian pembayaran kompensasi kepada pemilik lahan.
4. Terhadap berbagai kendala yang dihadapi tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap secara aktif terus melakukan langkah-langkah percepatan untuk penyelesaian pembangunan 65 lokasi KNMP yaitu antara lain:
- a. melakukan adendum kontrak dan opname sesuai kondisi lapangan secara berkelanjutan;
 - b. sisa kontrak pekerjaan yang melewati tahun anggaran 2025 telah didaftarkan melalui mekanisme RPATA;
 - c. telah mengusulkan permohonan dispensasi terhadap denda keterlambatan pelaksanaan program KNMP melalui Nota Dinas Dirjen Perikanan Tangkap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 17 Desember 2025;
 - d. memberikan arahan melalui berbagai saluran (*offline* maupun *online*) dengan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa (kontraktor) untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan **target penyelesaian seluruh lokasi selesai 100% pada 31 Januari 2025**. Secara jangka pendek, Ditjen Perikanan Tangkap juga menargetkan **20 lokasi selesai 100% pada 14 Januari 2026**.

5. Persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap II Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan Kontrak Tahun Jamak (KTJ) TA 2025-2026, beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Dokumen perencanaan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan KNMP Tahap II Tahun 2025 telah diselesaikan oleh konsultan perencana untuk 35 calon lokasi KNMP, antara lain berupa: Gambar Kerja atau *Detail Engineering Design* (DED), *Engineering Estimate*, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
 - 2) Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, selanjutnya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan KNMP Tahap II (telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran) telah menyelesaikan dokumen-dokumen pengadaan yang terdiri dari: Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja, rancangan kontrak, dan *Bill of Quantity* (BoQ).
 - 3) Lebih lanjut masing-masing PPK akan menyampaikan permohonan revidi dokumen pengadaan tersebut kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk selanjutnya mendapat perbaikan dan akan diajukan kembali untuk dilakukan tahapan pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode Penunjukan Langsung.
6. Kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Ruang Rapat Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 15, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat, kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Bp. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan ditutup oleh Bp. Sekretaris Jenderal KKP beberapa poin kata pembuka oleh Bp. Wakil Menteri KKP sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi pelaksanaan tentunya merupakan turunan program strategis Presiden RI, terutama Asta Cita Nomor 2, 5 dan 8 kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dipercayakan melaksanakan tindak lanjut implementasi Asta Cita, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
 - 2) Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang merupakan implementasi pelaksanaan budidaya ikan nila salin dan program pergaraman nasional. Berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 100 lokasi pada tahun ini, dengan tahap I sejumlah 65 dan tahap II 35 lokasi, kemudian dilanjutkan pada program tahun 2026 sampai 2027 yang diharapkan adanya

terbentuknya sarana pendidikan dan pelatihan, bantuan dari kepolisian serta TNI juga agar dapat berkolaborasi bersama dalam hal pembangunan, dengan melibatkan bantuan aparat di lapangan yang bersinergi dengan aparat di daerah.

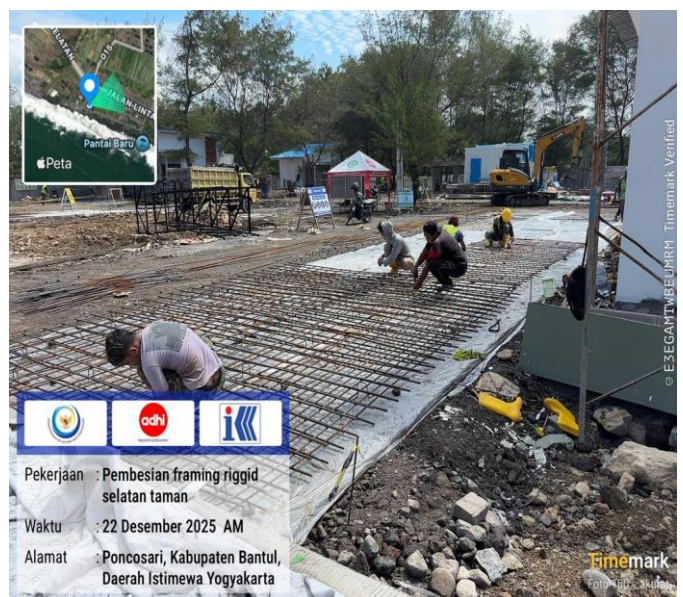
- 3) Harapannya kolaborasi ini akan berkelanjutan dan masih terdapat kaitannya dengan tanggul laut, sebagai Kepala Badan Otorita Pantura Jawa (Wamen) telah berkolaborasi overlay antara KNMP, KDMP, Kampung Budidaya dan Pantura dalam pelaksanaan tanggul laut, baik hulu maupun hilir.
 - 4) Diupayakan terdapat elaborasi pada pelaksanaan di lapangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - 5) Diharapkan agar tidak ada anggaran yang bocor untuk kegiatan operasional dan segala sesuatunya didiskusikan.
 - 6) Berkaitan dengan never ending story yang merupakan sosial ekonomi, dapat dilakukan dengan prinsip keterpaduan karena pada pelaksanaannya sangat sulit, oleh sebab itu pihak KKP dengan TNI serta Polri agar dapat berkolaborasi dan bersinergi.
 - 7) Tim terpadu berkolaborasi, baik tenaga ahli, profesor, maupun yang terkait sosek dapat berjalan bersama, hal yang berkaitan dengan lahan akan terkait proyek besar, hal ini dikuatkan adanya makelar juga permasalahan sosek, terkait hal tersebut perlu mencermati hal khusus yang ada sehingga dapat meminimalisir semua permasalahan yang ada dan berkolaborasi juga bersinergi antar semua pihak dengan dibuatkan parameter, contoh lokasi Subang, Indramayu, dan Karawang, harus terdapat mitigasi untuk mengatasi kondisi di lapangan.
 - 8) Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi, permasalahan garam budidaya, rumput laut, juga pertanian, dan terkait KNMP apabila positif agar dilaksanakan, saling bekerjasama membangun negara demi pembangunan yang baik demi bangsa dan negara.
 - 9) Perlu adanya mitigasi resiko, timeline, internal control, effectiveness, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, juga proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai, agar dicermati resiko laporan keuangan yang clear and clean.
7. Hasil pemantauan dan tinjauan lapangan dalam rangka dalam rangka pemantauan dan pendampingan Pekerjaan Konstruksi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran di lokasi KNMP Desa Kertojayan dan Jatimalang, Kabupaten Purworejo, serta Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, perwakilan Ditjen PDSKP, perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, perwakilan Dinas KP Provinsi DIY, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bantul, Kontraktor Pelaksana KNMP Bantul, Konsultan Pengawas KNMP Bantul, perwakilan Inspektorat 2 dan 4 KKP, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Poncosari, serta perwakilan Nelayan dan masyarakat Desa Poncosari. Pada tanggal 21 s.d 24 Desember 2025.
- 2) Usulan menu bantuan penataan Kampung Merah Putih yang diusulkan oleh Koperasi Desa Merah Putih Desa Poncosari antara lain:
 - a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Bangunan Gerbang Gapura
 - c. Pekerjaan Saluran Dan Jalan Lingkungan
 - d. Pekerjaan Pondasi Gudang Beku Portable
 - e. Pekerjaan Pondasi Pabrik Es Portable
 - f. Pekerjaan Shelter Pendaratan Ikan
 - g. Pekerjaan Kantor Pengelola
 - h. Pekerjaan Docking Kapal
 - i. Pekerjaan Bangunan Kios Perbekalan
 - j. Pekerjaan Bengkel Nelayan
 - k. Pekerjaan Shelter Coldbox
 - l. Pekerjaan Bangunan Shelter Perbaikan Jaring
 - m. Pekerjaan Balai Nelayan
 - n. Pekerjaan Toilet Umum
 - o. Pekerjaan Area Parkir
 - p. Pekerjaan Bangunan Tangki Air
 - q. Pekerjaan Penerangan Kawasan
 - r. Pekerjaan Tempat Pembuangan Sampah
 - s. Pekerjaan Bangunan Kios Kuliner
 - t. Pekerjaan Bangunan Ipal Biotech 2 M³
 - u. Pekerjaan Levelling
 - v. Pekerjaan Pagar Kawasan bangunan kios pemasaran ikan
- 3) Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyampaikan program KNMP Desa Poncosari tidak hanya menasar ke pembangunan fisiknya saja, tetapi juga aspek manusianya seperti pengembangan dan diversifikasi usaha bagi Nelayan dan keluarganya, bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan, fasilitasi Perlindungan Nelayan, dan kegiatan lain terkait pemberdayaan masyarakat Nelayan dan keluarganya. Selain itu juga akan diberikan bantuan berupa 10 unit kapal perikanan lengkap beserta mesin dan alat tangkapnya, serta bantuan 20 unit mesin kapal perikanan dan 34 paket alat tangkap bagi masyarakat Nelayan.

- 4) Kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator bidang Pangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari rangkaian dari strategi percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden Prabowo yang menargetkan tahun 2025 dapat dibangun sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
- 5) Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas progress pekerjaan konstruksi di Kabupaten Purworejo yang sudah mencapai diatas 75%. Beliau menyampaikan optimismenya pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna, dengan syarat bahwa setiap pemangku kepentingan baik kontraktor dan pengawas melakukan segala upaya percepatan yang dibutuhkan, pihak dinas memberikan pendampingan kepada masyarakat Nelayan, dan pihak KKP memberikan pemantauan dan akselerasi menyeluruh terhadap program KNMP ini.
- 6) Menko bidang pangan menyampaikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi *benchmark* bagi program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nantinya juga akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Nantinya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi simbol bahwa Negara Indonesia dapat menjadi besar karena ditopang oleh masyarakat bawah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- 7) Dalam Kunjungan Kerja ini Bapak Menko dan Bapak MKP melakukan tinjauan infrastruktur yang sedang dibangun di lokasi KNMP Desa Kertojoyan dan Desa Jatimalang. Beliau menyampaikan rasa optimisme bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan di Kabupaten Purworejo.
- 8) Pada kesempatan ini juga diberikan bantuan berupa sembako gratis bagi masyarakat Nelayan di lokasi KNMP dan simbolis bantuan Kapal, Mesin, Alat Tangkap, dan bantuan sarana rantai dingin bagi masyarakat Nelayan di lokasi KNMP.
- 9) Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dengan masyarakat Nelayan Desa Jatimalang. Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Jatimalang menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Presiden yang telah memilih Desa Poncosari menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan KNMP tahun 2025. Mereka juga berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang menjadi Koperasi Desa Merah Putih yang dapat survive dan terus berkembang kedepannya. Mereka berharap adanya dukungan pendampingan yang optimal dari KKP dan pihak lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas KDMP untuk mengelola KNMP ini.

Dokumentasi Kegiatan

Pemantauan Progres dan Pendampingan Progres KNMP Poncosari





Kunjungan Kerja Menko Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan

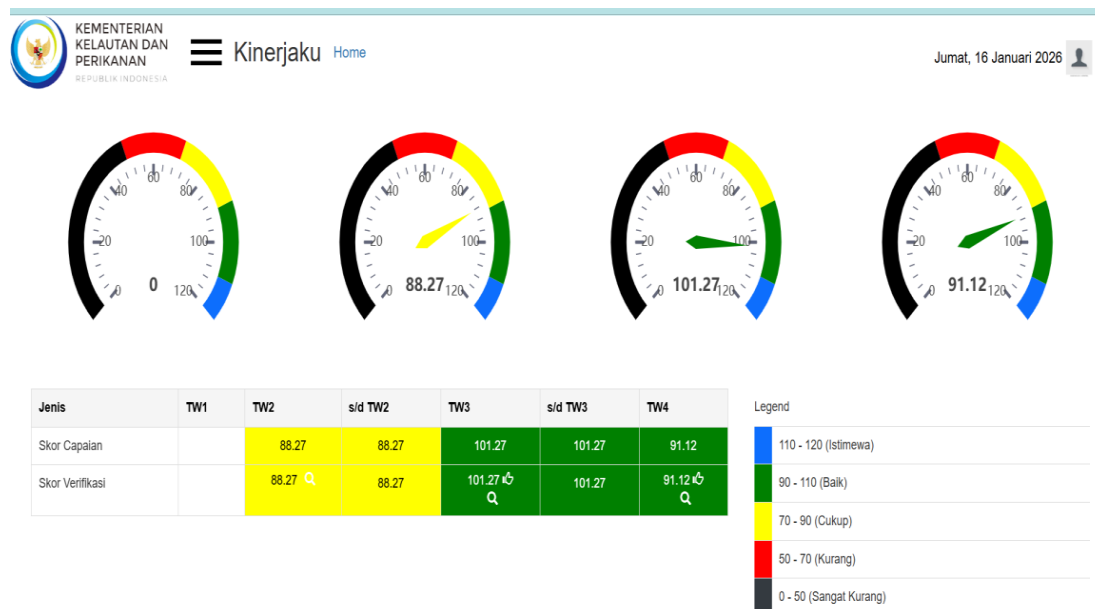




BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memperoleh nilai sebesar 91,12 %. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memiliki 3 Sasaran kegiatan dan 10 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada periode Triwulan IV Tahun 2025 kategori Baik. Ini bisa dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Triwulan IV, Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2025	
					Triwulan IV	% thd Target
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	56	124
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	113	113
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000	2283	45,6
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (Lokasi)	100	100	100
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (Persen)	100	127,3	127,3
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	6	Kelembagaan ekonominelayan yang dikembangkan (lembaga)	4	4	100
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	87	81,34	93,5
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88	89,55	101,76
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85	0	0
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98	90	91,8

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja
Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1 Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (Lima) indikator yakni (1) Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya, (2) Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (3) Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (4) Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (5) Persentase nelayan yang terlindungi

1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang meningkat kapasitasnya

Persentase Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya adalah kelompok usaha bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi (1) pembinaan kelembagaan (KUB) dan (2) Kegiatan pengembangan kelembagaan nelayan yang berbasis koperasi nelayan. Adapun jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025 sebanyak 2000 KUB. Capaian KUB yang mendapat pembinaan untuk ditingkatkan kapaitasnya sebanyak 202 KUB. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan pembinaan melalui pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi sebanyak 10 KUB sedangkan Capaian KUB yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan melalui pengembangan kelembagaan berbasis korporasi sebanyak 40 KUB. Adapun capaian persentase KUB yang meningkat kapasitasnya adalah sebesar 56% atau 124% dari target tahunan.

Tabel 6. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen).	45	56	124

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya karena perhitungan IKU ini berbeda dengan IKU tahun sebelumnya. Meskipun demikian kegiatan peningkatan KUB merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, namun tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Tabel 7. Tabel Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

Sasaran Kegiatan 1 : Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing				
IKU 1 : Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra DJPT	
Target Tahun 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
45	56	124	45	124

2. Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya adalah jumlah nelayan yang diharapkan dapat difasilitasi pengembangan usahanya melalui (1) Kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya, (2) Kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan.

Tabel. 8 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	113	113

Tabel 9. Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Sasaran Kegiatan 1 : Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing				
IKU. 2 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya				
Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra DJPT	
Target Tahun 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
100	113	113	100	113

Tahun 2024 tidak terdapat capaian IKU ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya serta perhitungan IKU ini berbeda dengan IKU tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan :

1. Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan di Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan.

Berikut salah satu kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya yang dilaksanakan di Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Desember 2025, Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kampung Nelayan Merah Putih melalui Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan serta Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan Mata Pencanharian Alternatif (MPA) bagi keluarga nelayan;
- b. Meningkatkan motivasi, kompetensi, keterampilan, dan manajemen usaha bagi keluarga nelayan;
- c. Mengurangi resiko kegagalan atas ketergantungan pada kegiatan usaha penangkapan ikan;
- d. Meningkatkan kapasitas teknis dan operasional usaha nelayan;
- e. Mendorong terbentuknya unit usaha yang mandiri dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan legalitas usaha, literasi keuangan dan keterampilan manajerial nelayan.
- g. Digitalisasi pemasaran dan perluasan jaringan distribusi produk.

Sedangkan maksud kegiatan ini adalah agar nelayan dan keluarganya dapat meningkat kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip pengembangan usaha dengan memperhatikan perencanaan usaha, peluang usaha, peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk, manajemen kelompok secara utuh dan penyusunan pelaporan serta meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam rangka menciptakan mata pencaharian alternatif bagi pendapatan keluarga nelayan.

Peserta Kegiatan Pemberdayaan Kampung Nelayan Merah Putih melalui Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan serta Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. 50 (lima puluh) orang keluarga nelayan (istri/putri) yang memiliki potensi melakukan diversifikasi usaha.
- b. 50 (lima puluh) orang nelayan perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai peserta kegiatan pengembangan usaha nelayan.

Narasumber yang menyampaikan materi kegiatan merupakan orang yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan dimaksud, maka narasumber/instruktur/pelatih setidaknya memenuhi poin sebagai berikut:

- 1) Instruktur untuk pelatihan perawatan/perbaikan mesin kapal, laminasi kapal, perikanan, dan Teknik Penanganan Ikan di Atas Kapal:

Mampu memperagakan langsung teknik bongkar-pasang, perawatan rutin (oli, filter, pendingin) dan troubleshooting kerusakan ringan hingga sedang mesin kapal.

- 2) Instuktur untuk peningkatan keterampilan pengolahan produk hasil perikanan : Berpengalaman dalam pengolahan produk hasil perikanan dan pernah memberikan pelatihan serupa. Mampu mengajar dengan metode praktik langsung (hands-on). Terampil menjelaskan teknik pengolahan secara sederhana dan aplikatif, serta dapat menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami.
- 3) Instruktur Teknik Memisahkan Daging Ikan dari Tulang/ Menfillet Ikan:
 - Menguasai teknik menfillet ikan dan memahami anatomi serta karakteristik daging ikan.
 - Berpengalaman melakukan dan mengajarkan teknik fillet ikan secara langsung. Menguasai prinsip kebersihan, sanitasi, dan pencegahan kontaminasi produk.
 - Mampu mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik fillet secara aman dan benar.
 - Menyampaikan materi secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami peserta.
 - Memahami peningkatan nilai ekonomi ikan melalui fillet dan efisiensi hasil Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kampung Nelayan
- 4) Instruktur untuk peningkatan keterampilan packaging, digital marketing, dan legalitas usaha:
 - Memahami jenis bahan kemasan (plastik, kertas, vacuum pack, food grade) dan teknik pengemasan sederhana.
 - Berpengalaman mendampingi UMKM dalam desain kemasan produk makanan.
 - Menguasai teknik dan prinsip desain kemasan menarik, hemat biaya, dan sesuai regulasi (label gizi, komposisi, logo halal/PIRT).
 - Memahami selera pasar dan tren kemasan yang menarik untuk produk rumahan.
 - Berpengalaman menggunakan platform seperti WhatsApp Business, Instagram, Facebook, dan Shopee/Tokopedia.
 - Menjelaskan strategi promosi sederhana (foto produk menarik, caption, hashtag, waktu posting). Bisa memandu langsung praktik membuat akun bisnis dan memposting produk.
 - Menyesuaikan dengan kemampuan peserta (yang mungkin masih awam teknologi).
 - Menguasai prosedur pengurusan legalitas seperti NIB dan PIRT. Menjelaskan proses legalitas dengan bahasa sederhana dan langkah langkah praktis.

5) Instruktur untuk Olahan Ikan Asap:

- Menguasai teknik pengasapan ikan (tradisional maupun semi-modern), termasuk pemilihan bahan baku, jenis kayu bakar, suhu, dan waktu pengasapan.
- Berpengalaman langsung dalam produksi ikan asap pada skala rumah tangga, UMKM, atau industri kecil, serta memahami permasalahan teknis di lapangan.
- Memahami faktor yang memengaruhi mutu, aroma, warna, tekstur, serta daya simpan ikan asap.
- Mampu mendemonstrasikan proses pengolahan ikan asap secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami peserta.

6) Narasumber Sinergi Program KNMP melalui KDMP dan SPPG dalam Penyediaan Bahan Baku Program MBG:

- Memahami kebijakan KNMP, peran KDMP dan SPPG, serta keterkaitannya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan atau pendampingan program lintas sektor, khususnya penguatan rantai pasok pangan/bahan baku.
- Menguasai mekanisme penyediaan, pengelolaan, dan distribusi bahan baku melalui kelembagaan nelayan atau masyarakat.
- Mampu menjelaskan peran dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Menyampaikan materi secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh peserta

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan serta fasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 – 15 Desember 2025, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berikut beberapa kesimpulan dari kegiatan tersebut :

- a) Kegiatan Pemberdayaan Kampung Nelayan Merah Putih melalui Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan serta Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan di Kab. Lampung Selatan difokuskan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nelayan dan keluarganya. Tidak hanya dalam penangkapan ikan, tetapi juga melalui usaha alternatif seperti pengolahan hasil perikanan, budidaya, jasa perbengkelan kapal, maupun produk kreatif pesisir.
- b) Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran perempuan dan generasi muda dalam pengembangan usaha nelayan. Perempuan nelayan, khususnya istri nelayan, memiliki potensi besar dalam aktivitas pengolahan hasil perikanan, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Melalui kegiatan ini, kita dorong peningkatan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha rumah tangga pesisir yang tangguh.

- c) Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Desember 2025 di Kab. Lampung Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini memiliki manfaat, antara lain:

Bagi Nelayan:

- 1) Meningkatkan keterampilan teknis dalam perawatan dan perbaikan mesin kapal perikanan.
- 2) Menambah wawasan dan kemampuan dalam Teknik laminasi kapal.
- 3) Mengurangi ketergantungan terhadap teknisi luar dan menekan biaya operasional.

Bagi Istri/Keluarga Nelayan:

- 1) Meningkatkan keterampilan dalam pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget ikan, bakso ikan, dan kaki naga.
 - 2) Memahami teknik pengemasan produk perikanan yang baik guna memperpanjang masa simpan dan meningkatkan daya saing.
 - 3) Menguasai strategi pemasaran digital melalui platform online.
 - 4) Memperoleh pemahaman dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT.
- d) Dengan adanya program ini, diharapkan nelayan dan keluarga mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan, serta lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Program ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia



Praktek Pembuatan Olahan Produk Perikanan



Praktek Pembuatan Olahan Produk Perikanan



Produk Hasil Pelatihan Olahan Ikan



Produk Hasil Pelatihan Olahan Ikan



Produk Hasil Pelatihan Olahan Ikan



Produk Hasil Pelatihan Olahan Ikan



Peserta Pelatihan



Peserta Pelatihan

3. Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan adalah nelayan yang memiliki tanah baik lahan hunian maupun lahan kosong/produktif untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi bersertifikat sesuai dengan ketentuan. Kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan (bank dan non bank). Adapun kegiatan dilakukan berupa sosialisasi pra dan pasca SeHAT nelayan, identifikasi lapang dan pendampingan. Target tahun 2025 sebanyak 5.000 CPCL. Sampai saat ini baru tercapai sebanyak 2.283 CPCL atau sebesar 45,6% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Tabel. 10 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan.	5.000	2283	45,6

Tabel 11. Capaian Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

Sasaran Kegiatan 1 : Pengelolaan kenelayanan maju dan bersaing				
IKU. 3 : Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan				
Realisasi TW IV Tahun 2025				Renstra DJPT
Target Tahun 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
5000	2283	45,6	5000	45,6

Tabel 12. Perbandingan realisasi indikator kinerja Nelayan yang difasilitasi Kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

Indikator Kegiatan	Capaian TW III 2025	Capaian TW IV 2025
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	1867	2283

4. Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya

Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya adalah kampung nelayan Merah Putih yang dibangun atau diperbaiki fasilitas umum dan fasilitas usahanya melalui kegiatan yang berasal dari pendanaan oleh instansi pemerintah, BUMN, Swasta atau swadaya masyarakat. Tujuan dari penataan kampung nelayan Merah Putih adalah terciptanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Pada tahun 2025 IKU ini ditargetkan sebanyak 100 lokasi. Adapun pelaporan capaian IKU ini baru bisa dilaporkan pada akhir tahun karena periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel. 13 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (Lokasi)	100	100	100

5. Persentase nelayan yang terlindungi

Persentase nelayan yang terlindungi adalah nelayan yang terlindungi dalam kegiatan penangkapan ikan baik terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan. Jumlah nelayan yang ditargetkan teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan sebanyak 50.000 sedangkan jumlah nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan sampai dengan triwulan IV sebanyak 63.642 orang nelayan berdasarkan aplikasi KUSUKA. Adapun capaian IKU ini sampai dengan TW IV adalah 127,3 %. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama karena metode perhitungan berbeda dengan metode perhitungan tahun sebelumnya sehingga hasil capaian juga berbeda.

Tabel. 14 Persentase nelayan yang terlindungi

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Persentase nelayan yang terlindungi	100	127,3	127,3

Tabel.15 Perbandingan Capaian Persentase nelayan yang terlindungi

Indikator Kegiatan	Capaian TW III 2025	Capaian TW IV 2025
Persentase nelayan yang terlindungi	93,89	127,3

Tabel. 16 Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase nelayan yang terlindungi

Sasaran Kegiatan 1 : Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing				
IKU. 5 : Persentase nelayan yang terlindungi				
Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra DJPT	
Target Tahun 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
100	127,3	127,3	100	127,3

3.2.2 Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha

Indikator Kinerja Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)

Indikator ini merupakan Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan adalah Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, pengembangan model bisnis usaha perikanan tangkap, serta pembinaan dalam membangun kerjasama kemitraan dengan kelembagaan usaha lainnya.

Tabel. 17. Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang dikembangkan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang dikembangkan	4	4	100

Tahun 2025 telah mencapai target yang ditentukan adapun data capaian kelembagaan yang terbentuk sebagai berikut :

I. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja

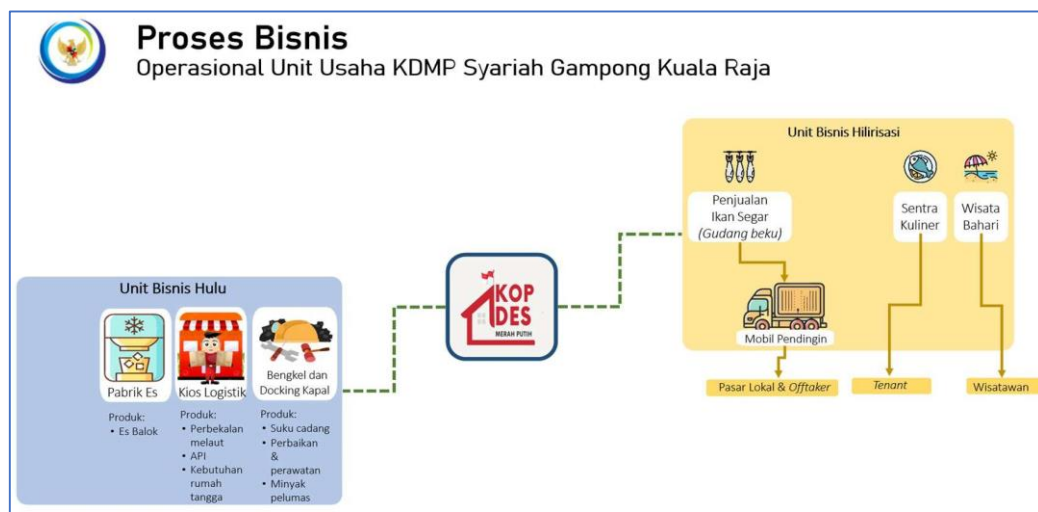
a. Profil

- 1) Nama Koperasi Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja

2) Alamat :

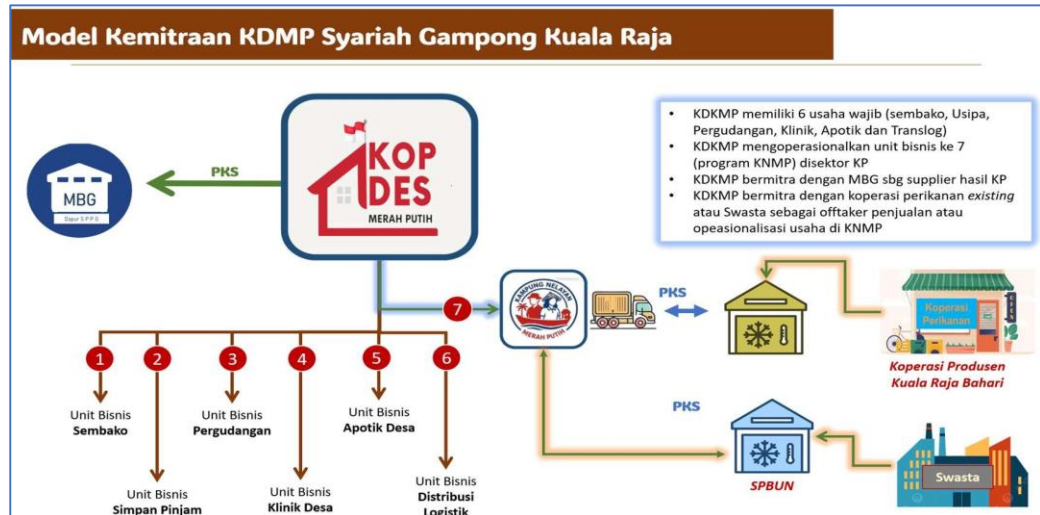
- a) Desa/Kelurahan : Kuala Raja

- b) Kecamatan : Kuala
 c) Kabupaten/Kota : Bireuen
 d) Provinsi : Aceh
- 3) KUB Terintegrasi :
- KUB Bintang Meutabu
 - KUB Bakat Malaka
 - KUB Diraja
- 4) Koperasi Perikanan Terintegrasi:
 Koperasi Produsen Kuala Raja Bahari
- 5) Unit Usaha di Bidang Kelautan Dan Perikanan : gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner dan jasa transportasi logistik.
- 6) Komodi Unggulan : tongkol, cakalang, tuna, selar, tenggiri, layur, kuwe, teri
- 7) Produksi : 90 ton per bulan
- b. Kelembagaan dan Tata Kelola
- Nomor Badan Hukum : AHU-0012153.AH.01.29.TAHUN 2025
 - Nomor Induk Koperasi (NIK) : 1110140140008
 - Pengurus
 - Ketua : Nasrol
 - Sekretaris : Tiara Munawarah
 - Bendahara : Supriadi
 - Potensi Anggota : > 500 orang
 - Jumlah SOP : 7
- c. Model Bisnis
- Skema model bisnis yang akan diusahakan



Gambar 3. Operasional Unit Usaha KDMP Syariah Gampong Kuala Raja

- d. Kerja Sama / Kemitraan
Skema kerja kemitraan yang akan



Gambar 4. Model Kemitraan KDMP Syariah Gampong Kuala Raja

II. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Warloka

a. Profil

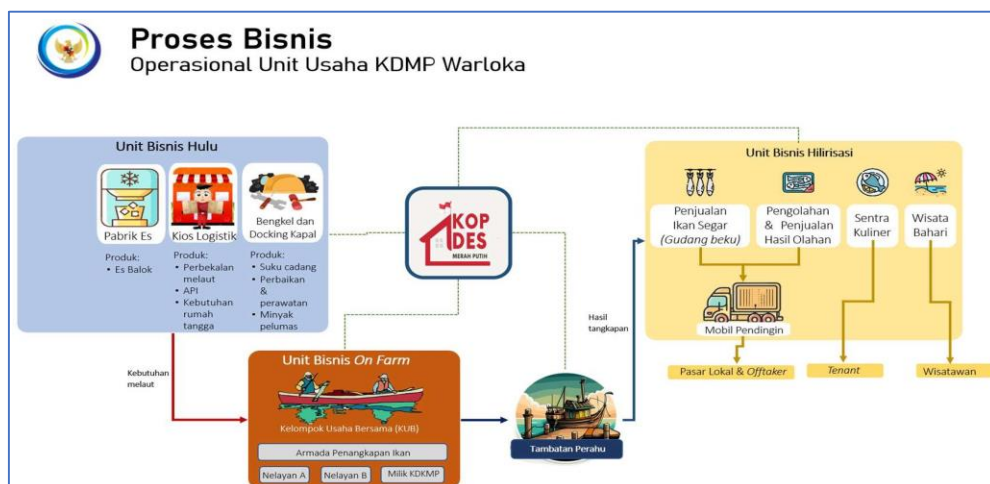
- 1) Nama Koperasi : Koperasi Desa Merah Putih Warloka
- 2) Alamat
 - a) Desa/Kelurahan : Warloko
 - b) Kecamatan : Komodo
 - c) Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
 - d) Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- 3) KUB Terintegrasi :
 - a) KUB Ikan Bengkole
 - b) KUB Lumba-lumba
 - c) KUB Hasil Laut
- 4) Koperasi Perikanan Terintegrasi : Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar
- 5) Unit Usaha di Bidang Kelautan Dan Perikanan : gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner, penangkapan ikan dan jasa transportasi logistik.
- 6) Komoditi Unggulan : selar, tenggiri, layur, kuwe
- 7) Produksi : 90 ton per bulan

b. Kelembagaan dan Tata Kelola

- 1) Nomor Badan Hukum : AHU-0019864.AH.01.29.TAHUN 2025
- 2) Nomor Induk Koperasi (NIK): 5315010190002
- 3) Pengurus
 - a) Ketua : Bustanil Arifin
 - b) Sekretaris : Abdul Basco
 - c) Bendahara : Oktaviana Frovensia Harnisa
- 4) Potensi Anggota : > 1.000 orang
- 5) Jumlah SOP : 8

c. Model Bisnis

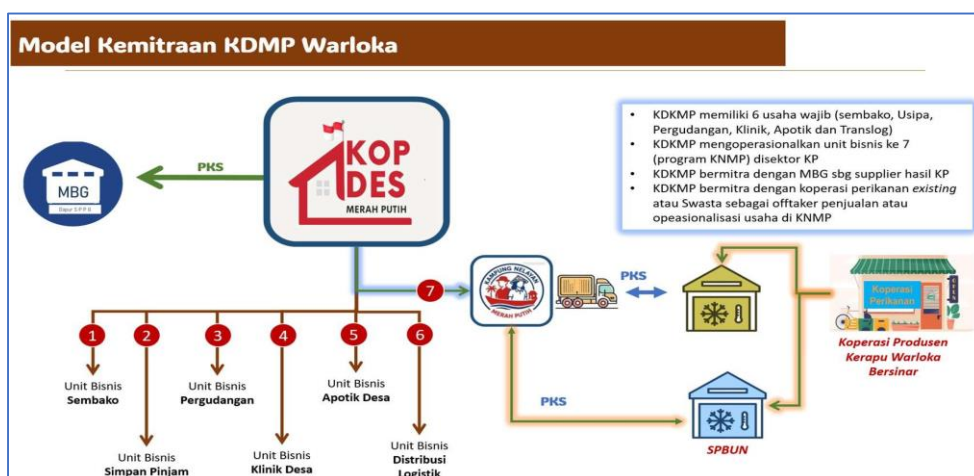
Skema model bisnis yang akan diusahakan



Gambar 5. Operasional Unit Usaha KDMP Warloka

d. Kerja Sama / Kemitraan

Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan



Gambar 6. Model Kemitraan KDMP Warloka

III. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya

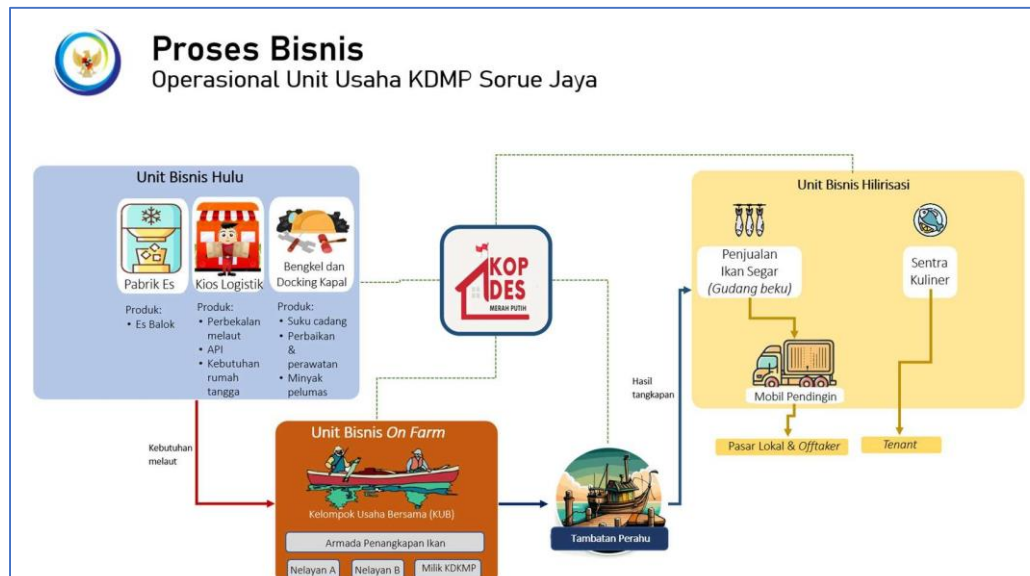
a. Profil

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya
- 2) Alamat
 1. Desa/Kelurahan : Sorue Jaya
 2. Kecamatan : Soropia
 3. Kabupaten/Kota : Konawe
 4. Provinsi : Sulawesi Tenggara
- 3) KUB Terintegrasi :
 1. KUB Harapan Bersama
 2. KUB Lestari
- 4) Koperasi Perikanan Terintegrasi : Koperasi Produsen Cahaya Alam Bokori
- 5) Unit Usaha di Bidang Kelautan Dan Perikanan : gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner, penangkapan ikan dan jasa transportasi logistik.
- 6) Komoditi Unggulan : tongkol, cakalang, tuna, selar, tenggiri, layur, kuwe, teri, gurita
- 7) Produksi : 100 ton per bulan

b. Kelembagaan dan Tata Kelola

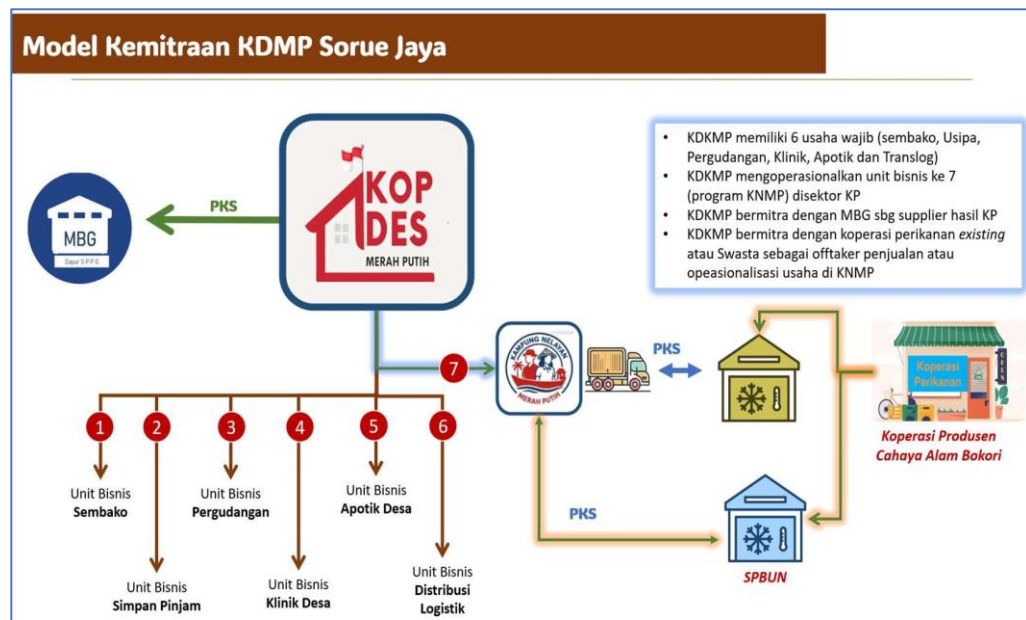
- 1) Nomor Badan Huku : AHU-0033253.AH.01.29.TAHUN 2025
- 2) Nomor Induk Koperasi (NIK) : 7403090100002
- 3) Pengurus
 1. Ketua : Musyair
 2. Sekretaris : Ayen
 3. Bendahara : Dhian Trianti
- 4) Potensi Anggota : > 500 orang
- 5) Jumlah SOP : 8

- c. Model Bisnis
Skema model bisnis yang akan diusahakan



Gambar 7. Operasional Unit Usaha KDMP Sorue Jaya

- d. Kerja Sama / Kemitraan
Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan



Gambar 8. Model Kemitraan KDMP Sorue Jaya

IV. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Lateng

a. Profil

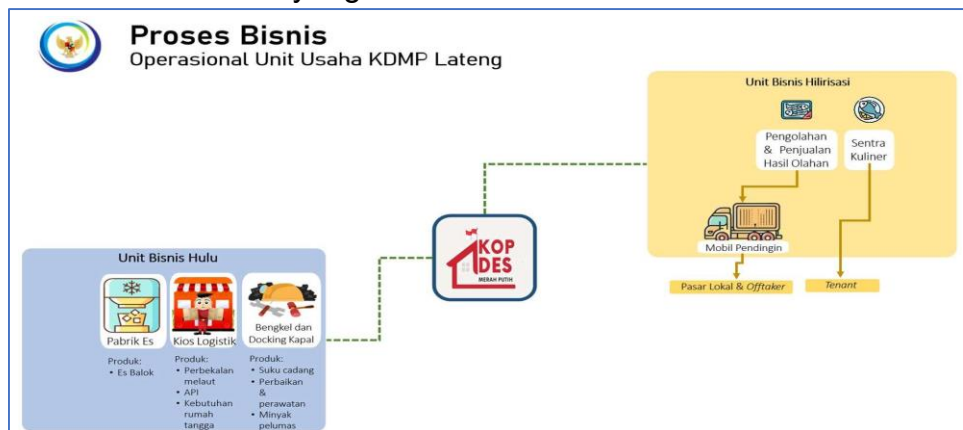
- 1) Nama Koperasi : Koperasi Desa Merah Putih Lateng
- 2) Alamat
 1. Desa/Kelurahan : Lateng
 2. Kecamatan : Banyuwangi
 3. Kabupaten/Kota : Banyuwangi
 4. Provinsi : Jawa Timur
- 3) KUB Terintegrasi :
 1. KUB Pawon
 2. KUB Pantai Rejo
- 4) Koperasi Perikanan Terintegrasi : Koperasi Produsen Mandar Berkah Sejahtera
- 5) Unit Usaha di Bidang Kelautan Dan Perikanan : pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner dan jasa transportasi logistik.
- 6) Komoditi Unggulan : tongkol, tuna, putihan, tenggiri
- 7) Produksi : 60 ton per bulan

b. Kelembagaan dan Tata Kelola

- 1) Nomor Badan Hukum : AHU-0017601.AH.01.29.TAHUN 2025
- 2) Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3510180060007
- 3) Pengurus
 1. Ketua : Buang Enik
 2. Sekretaris : Achmad Roziqin
 3. Bendahara : Octaviantiningsih
- 4) Potensi Anggota : > 500 orang
- 5) Jumlah SOP : 6

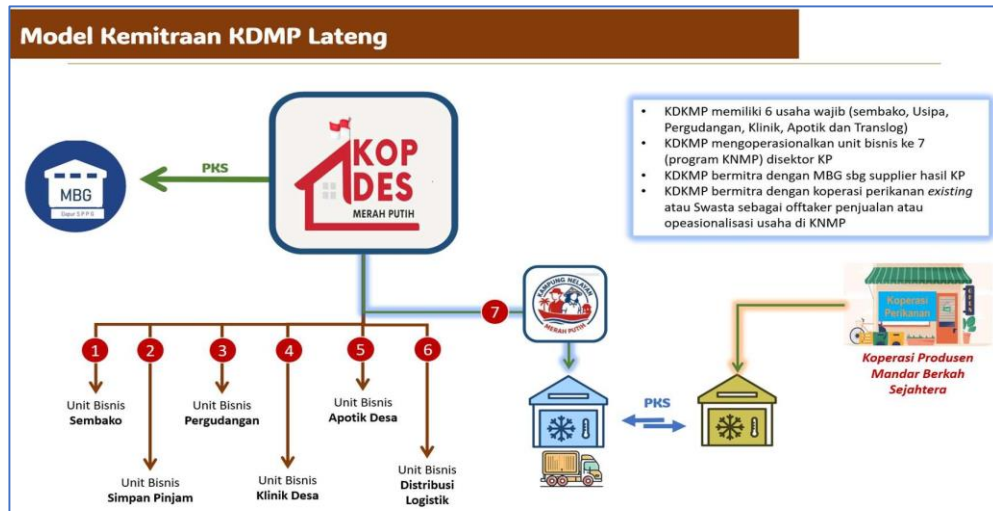
c. Model Bisnis

Skema model bisnis yang akan diusahakan



Gambar 9. Operasional Unit Usaha KDMP Lateng

- d. Kerja Sama / Kemitraan
Skema kerja kemitraan yang akan



Gambar 10. Model Kemitraan KDMP Lateng

3.2.3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (Empat) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (4) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks professionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar.
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai kompetensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut :
 - (a) Pejabat Struktural dihitung dengan komponen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR

- (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR
- (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja**. Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin**, berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran berikut capaian pada periode triwulan IV Tahun 2025.

Tabel. 18 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	87	81,34	93,5

2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada triwulan IV belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel 19. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV 2025	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	88	89,55	101,76

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan LHP mendapat capaian IKU triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 0 %.

Tabel.20 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan IV	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	85	0	0

4. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana Tahun 2025 ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar – besaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggaran maupun secara volume. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

Tabel. 21 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW IV	%
Persentase Penyerapan Anggran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	98	90	91,8

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **6.629.850.000,-** sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA- DIPA-032.03.1.238720/2024 tanggal 02 Desember 2024. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan anggaran pemerintah seperti efisiensi anggaran maka Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan setelah melalui revisi anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp **1.121.814.174.000,-** miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 680.771.278.989,- juta atau sebesar 90 % dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

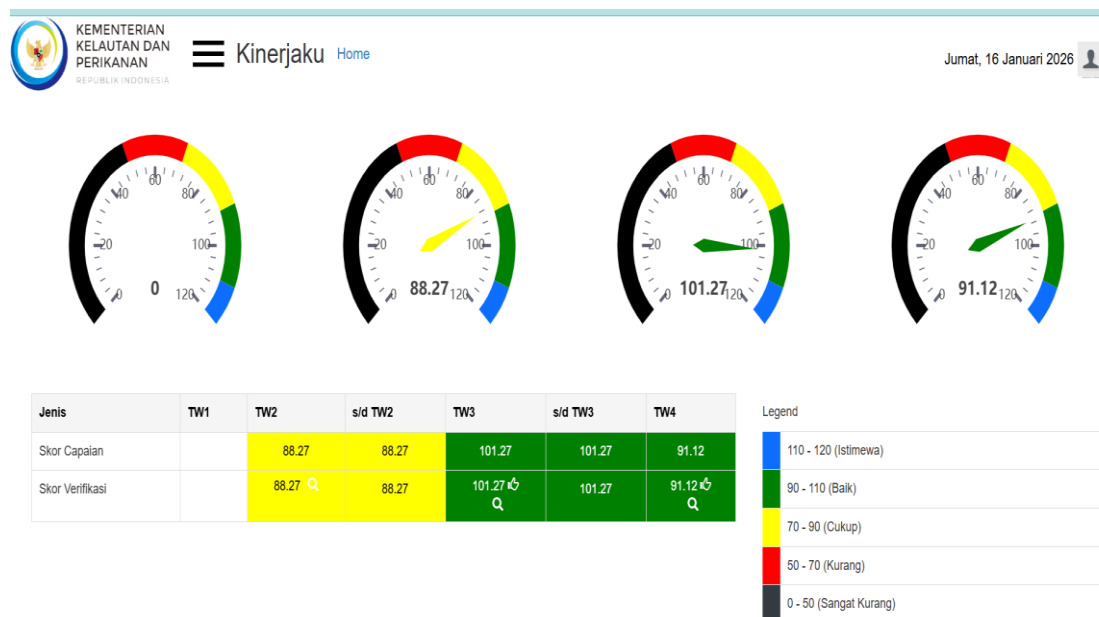
**Tabel 22. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025,
Berdasarkan jenis kegiatan**

Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Sekarang	Realisasi	Prosentase Realisasi
	Anggaran Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	6.629.850.000,00	1.121.311.554.000	1.003.834.884.470	90
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		984.129.000	893.270.230	91
QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya		336.000.000	268.818.935	
QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya		248.649.000	227.247.295	
QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya		399.480.000	397.204.000	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		502.620.000	394.351.313	
QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas		266.160.000	259.250.000	
QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat		236.460.000	135.101.313	
QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat		1.120.006.853.000	1.002.707.144.314,00	90
QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya		1.120.006.853.000	1.002.707.144.314,00	
QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		320.572.000	234.469.926	73
QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan		320.572.000	234.469.926	

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 91,12 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



Gambar 11.
Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025



NKO Desember - 2025

Download

Unit Kerja : DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN

Skor Kinerja : 91.12

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🔄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Pengelolaan Kenelayan Maju dan Berdaya Saing						101,58		
IKSK.1	Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya (persen) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	45,00	45,00	56,00	120,00	12-Jan-2026 10:06
IKSK.2	Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (Persen) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	113,00	113,00	12-Jan-2026 10:06
IKSK.3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.000,00	5.000,00	2.283,00	45,66	12-Jan-2026 10:06
IKSK.4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (Lokasi) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	12-Jan-2026 10:06
IKSK.5	Persentase Nelayan yang terlindungi (persen) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	127,30	120,00	12-Jan-2026 10:06
SK.02	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha						100,00		
IKSK.02.1	Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lokasi) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	4,00	4,00	100,00	12-Jan-2026 10:06
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan						71,77		
IKSK.02.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	87,00	81,34	93,49	12-Jan-2026 10:06
IKSK.02.2	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	89,55	101,76	12-Jan-2026 10:06
IKSK.02.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	0,00	0,00	12-Jan-2026 10:06
IKSK.02.4	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen) Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	98,00	90,00	91,84	12-Jan-2026 10:06

Tutup

Gambar 12.
*Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna hijau pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti Baik (*gambar dashboard kinerjaku*).

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
 - a. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
 - b. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan.
2. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

DATA DUKUNG CAPAIAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 43/DJPT.6/RC.610/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV, Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan IV, Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



D. Mahrus

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : 43/DJPT.6/RC.610/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Triwulan IV, Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2025	Triwulan IV	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	56	124
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	113	113
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5000	2283	45,6
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	100	100	100
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	127,3	127,3
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	6	Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)	4	4	100
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	87	81,34	93,5
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88	89,55	101,76
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85	0	0
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98	90	91,8

- a. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing, IKU 1. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

IKU	Jumlah Capaian	Konversi KUB	Keterangan
Kelembagaan	2505	250	asumsi 1 KUB = 10 orang/nelayan
Korporasi	4	40	asumsi 1 Korporasi = 10 KUB

KETERANGAN : Korporasi data 0 karena belum ada realisasi koperasi

FKB	250
FKN	40

$$\begin{aligned}
 \text{KUB} &= \frac{0,125}{2} + \frac{1}{100} \times 100 \\
 &= 0,5625 \times 100 \\
 &= 56,25 \\
 &= 56
 \end{aligned}$$

FORMULA PERHITUNGAN

$$KUB = \left(\frac{\left(\frac{FKB}{TFKB} \right) + \left(\frac{FKN}{TFKN} \right)}{2} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- KUB : Persentase KUB yang meningkat kapasitasnya
- FKB : Jumlah KUB yang mendapat pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya
- TFKB : Jumlah KUB yang menjadi target pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya Tahun Anggaran 2025 (2.000 KUB)
- FKN : Jumlah KUB yang menjadi target pembinaan melalui pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan (asumsi 1 korporasi nelayan membina 10 KUB)
- TFKN : Jumlah KUB yang menjadi target pembinaan melalui pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan Tahun Anggaran 2025 (4 korporasi nelayan = 40 KUB)

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
1	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	PAWANG LAOT
2	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	PAWANG LAUT
3	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	Rahmat Laot
4	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	RAKAN LAOT
5	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	RAKAN PASI
6	Aceh	Aceh Utara	Syamtalira Bayu	Lancok	Selat Malaka
7	Aceh	Bireuen	Kuala	Kuala Raja	BAKAT MALAKA
8	Aceh	Bireuen	Kuala	Kuala Raja	BINTANG MEUTABU
9	Aceh	Bireuen	Kuala	Kuala Raja	DIRAJA
10	ACEH	BIREUEN	KUALA	KUALA RAJA	BINTANG MEUTABU
11	Bali	Karangasem	Karangasem	Bugbug	Segara Sari
12	Bali	Karangasem	Karangasem	Bugbug	Segara Sari
13	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	SINAR BINTANG
14	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	Bahagia Bahari
15	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	muara benua
16	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	BINTANG BAHARI
17	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	CAHAYA BAHARI
18	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	Sidaz Bahari
19	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	Barkah Homarus
20	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	Dea Bahari
21	Banten	Lebak	Bayah	Bayah Barat	HASIL LAUT
22	Banten	Pandeglang	Sumur	Kertamukti	Jaya Bahari
23	Banten	Lebak	Wanasalam	Muara	NELAYAN GILNET BINUANGEUN II
24	Banten	Lebak	Wanasalam	Muara	NELAYAN GILNET BINUANGEUN I
25	Banten	Lebak	Wanasalam	Muara	PUSLON
26	Banten	Lebak	Wanasalam	Muara	PUTRI TANJUNG
27	Banten	Lebak	Wanasalam	MUARA	NELAYAN KARANG MALANG
28	Banten	Pandeglang	Sumur	RT 4	Karya Bahari
29	Banten	Lebak	Bayah	Sawarna	RUKUN NELAYAN
30	Banten	Pandeglang	Sumur	Sumberjaya	Anggun Jaya
31	Banten	Pandeglang	Sumur	Sumberjaya	Sumber Laut
32	Banten	Serang	Tirtayasa	SUSUKAN	BERKAH NELAYAN
33	Banten	Pandeglang	CIKEUSIK KAB. PANDEGLANG	CIKIRUH WETAN	SINAR BINTANG
34	Banten	Pandeglang	CIKEUSIK KAB. PANDEGLANG	cikiruh wetan	muara benua
35	Banten	Pandeglang	Cikeusik Kab. Pandeglang Banten	Cikiruh Wetan	Bahagia Bahari
36	Banten	Pandeglang	Cikeusik Kab. Pandeglang Banten	Cikiruh wetan	Sinar Bintang
37	Banten	Pandeglang	Cikeusik	Cikiruhwetan	Sidaz Bahari
38	Banten	Pandeglang	Cikeusik Kabupaten Pandeglar	Cikiruhwetan	BINTANG BAHARI
39	Banten	Pandeglang	Cikeusik Kabupaten Pandeglar	Cikiruhwetan	CAHAYA BAHARI
40	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Bara Kuda
41	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Bawal I
42	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Bintang Samudera
43	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Ikan Sembilang 2
44	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Mutiara Bahari
45	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Nusantara I
46	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Putera Nusantara
47	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Putra Bahari
48	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Putra Bahari I
49	Banten	Kota Serang	Kasemen	Banten	Putra Mandiri

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
444	Jawa Barat	Cirebon	Mundu	Citemu	Purna Bhakti Nagari
445	Jawa Barat	Cirebon	Mundu	Citemu	Sumber Rizky Nelayan
446	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	AGUNG JAYA
447	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	KARYA DO'A
448	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	Mina Jaya Bakti
449	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	MINA JAYA BHAKTI
450	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	MINA KARYA BARU
451	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	MINA MANDIRI
452	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	MINA USAHA BARU
453	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	MITRA USAHA
454	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	DADAP	Putri Bahari Sumber Rezeki Dadap
455	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Dadap	SUMBER REZEKI DADAP
456	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Juntikedokan	Mina Mandiri Glayem
457	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Juntikedokan	Mina Sari Glayem
458	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Juntikedokan	MINA SARI MANDIRI
459	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Juntikedokan	MULYA JAYA MANDIRI
460	Jawa Barat	Sukabumi	Cisolek	Karangpapak	Damar Laut
461	Jawa Barat	Garut	Mekarmukti	Karangwangi	Bina Wangi
462	Jawa Barat	Kota Cirebon	Kejaksan	Kesenden	Bahari Sejahtera
463	Jawa Barat	Kota Cirebon	Kejaksan	Kesenden	BARUNA DUJA
464	Jawa Barat	Kota Cirebon	Kejaksan	Kesenden	Pancer Laut
465	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemahwungkuk	Kp Cangkol Teng	JENAHHA
466	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	KAKAP MERAH
467	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	LIMBANGAN	Laut Jaya Mandiri
468	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Limbangan	MINA MILIK JAYA
469	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Limbangan	MINA RAWUD
470	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Limbangan	MINA WINDI
471	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Limbangan	RAMPUS MANDIRI
472	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Lombang	MINA KARYA LOMBANG
473	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Lombang	REGAL JAYA LOMBANG
474	Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Lombang	TUNGGAL JAYA LOMBANG
475	Jawa Barat	Karawang	Cilamaya Wetan	Muarabaru	Harapan Maju
476	Jawa Barat	Karawang	Cilamaya Wetan	Muarabaru	Nelayan Maju Terus
477	Jawa Barat	Karawang	Cilamaya Wetan	Muarabaru	Sumber Bahari
478	Jawa Barat	Garut	Cikelet	Pamalayan	Jaya Abadi
479	Jawa Barat	Garut	Cikelet	Pamalayan	Lestari
480	Jawa Barat	Garut	Cikelet	Pamalayan	Pawit Tunggal Jaya
481	Jawa Barat	Pangandaran	Kalipucang	Pamotan	MINA CIPATAT JAYA
482	Jawa Barat	Pangandaran	Kalipucang	Pamotan	TARUNA MANDIRI
483	Jawa Barat	Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan	Berkah Rizki
484	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemahwungkuk	Panjunan	CITRA NELAYAN
485	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemahwungkuk	Panjunan	MITRA JAYA
486	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	BETING MANDIRI
487	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	NELAYAN MANDIRI
488	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	SURYA LAUT
489	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Bahagia Baru Beting
490	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Bahagia Radar Bahari
491	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Beting Harapan
492	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan Abadi Beting
493	Jawa Barat	Bekasi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Rampus Jaya 1

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
948	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Marangkayu	Semangko	MITRA LAUT
949	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	MUARA MUNTAI	TANJUNG BATUQ HARAPAN	BUNGA TANJUNG
950	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	Waru	Waru	Al- Kautsar (Up Date September 2024)
951	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Bone Raya
952	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Mina Nelayan Sejahtera
953	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Sinar Abadi Jaya
954	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Barat	Imbaya Taika
955	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Selatan	Nelayan Mangrove
956	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Selatan	Nelayan Bersama
957	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Selatan	Bagan Sei Kura
958	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Timur	Rumpon Nelayan
959	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Timur	Nibung Bahari
960	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Timur	Keratong
961	Kalimantan Utara	Bulungan	Bunyu	Bunyu Timur	Karang Harapan Jaya
962	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Sinar Abadi Jaya
963	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Mina Nelayan Sejahtera
964	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	Bone Raya
965	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Harapan	Pulau Sadau Kemindi
966	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	Karang Harapan	Bahtera Bahari Makmur
967	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	MANGKUPA	USAHA MANDIRI
968	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	MANGKUPA	TERI INDAH
969	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Mangkupadi	Usaha Mandiri
970	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Mangkupadi	TUNAS NELAYAN
971	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Mangkupadi	Rukun Nelayan
972	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Mangkupadi	Lobster
973	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	TUNAS NELAYAN
974	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	Tugu Raya
975	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	Sipatuo Jaya
976	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	Nelayan Tugu Riap
977	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	Nelayan Padaelo
978	Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	Kelong Nelayan
979	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	Koba	Berok	JEMBATAN BEROK
980	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	Manggar	Baru	Cahaya Buana
981	Kep. Bangka Belitung	Belitung	Sijuk	Batu Itam	Tunggul Bulin
982	Kep. Bangka Belitung	Belitung	Sijuk	Batu Itam	Terumbu Sutong
983	Kep. Bangka Belitung	Belitung	Sijuk	Batu Itam	Tajor Pacat
984	Kep. Bangka Belitung	Belitung	Sijuk	Batu Itam	Bina Pangkalan Kapor
985	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Bukit Terap	Tanjung Pao
986	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Bukit Terap	Bukit Terap
987	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Bukit Terap	Barakuda
988	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Pasir Putih	Tawon Liar
989	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Pasir Putih	Tanjung Kerasak Maju
990	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Pasir Putih	Tanjung Kerasak Bersama
991	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Pasir Putih	Puding Jaya
992	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Usaha Baru Mandiri
993	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Sinar Terang
994	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Garuda Jaya
995	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Fajar Berseri
996	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Assedi Siddingeng
997	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Sadai	Angin Laut

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
1451	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Hu u	Jala	Bintang Laut
1452	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Samudera Hindia
1453	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Samakal I
1454	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Mada Oi Sahe
1455	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Doro More
1456	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Doro Belanda
1457	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Banana Jaya
1458	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Huu	Jala	Bahari Jaya
1459	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Usaha Bersama
1460	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Lembonga Pattana
1461	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Lembong Pottana
1462	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Harapan Kita
1463	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Cinta Bahari
1464	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Bintang Laut
1465	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Bajo Mandiri
1466	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	Bahari Lestari
1467	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Lekong	Saling Santurit
1468	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Alas Barat	Lekong	Saling Santuret
1469	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Panjisari	Patuh Pacu
1470	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Panjisari	Nelayan Maju
1471	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Panjisari	Kemulah Jaya
1472	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Panjisari	Gelondong Jaya
1473	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Panjisari	Bersatu Padu
1474	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Prapen	Tawes II
1475	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Prapen	Tawes I
1476	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Prapen	Pemberdayaan Masyarakat
1477	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Prapen	Pade Angen
1478	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Prapen	Nila Bersatu I
1479	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Semayan	Pesopok Angen
1480	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Semayan	Pade Girang
1481	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Semayan	Pade Angen 1
1482	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Semayan	Pade Angen
1483	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya	Semayan	Bubu Mas
1484	Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Laut	Adang	Beringin
1485	Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Laut	Adang	Buton
1486	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sulamu	Sulamu	Netral
1487	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sulamu	Sulamu	Samudera Jaya
1488	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sulamu	Sulamu	Tekat
1489	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Cumi Teropong
1490	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Gurita
1491	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Ikan Barakuda
1492	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Ikan Dapa
1493	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Ikan Lajang
1494	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Ikan Sancara
1495	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Ikan Tenggiri
1496	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Kakap Merah
1497	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Kakap Putih
1498	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Lajang Super
1499	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Maju Bersama
1500	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Nelayan Berkah
1501	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Pesisir	Selat Molo

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
1960	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	-PT MANDIRI LAUT
1961	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	-PT PESISIR PANTAI
1962	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	Pt Saro Mase
1963	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	-PT TENRISANGKA
1964	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	SAMATURU 2
1965	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	SARO MASE
1966	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	BATU BERLIAN
1967	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	CAHAYA KARAMA
1968	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	INA SAKINA
1969	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	KELAUTAN BIRU
1970	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PABBIRING KASSI
1971	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PUTRA BAHARI
1972	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PUTRA KAMASE
1973	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	SINAR AENG BATU-BATU
1974	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	SIPAKAINGA
1975	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	AMANAH
1976	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	BUNGA LAUT
1977	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	DARA MUDA
1978	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	LAUT BIRU
1979	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	MALLIBU MATENE
1980	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	MARIO
1981	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	SAMUDRA MATENE
1982	Sulawesi Selatan	Barro	Tanete Rilau	Tanete	SIPAKAINGA
1983	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	CAHAYA KURI LOMPO
1984	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	GUNA BAHARI
1985	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	JAPING-JAPING JAYA
1986	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	KURI BERKAH
1987	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	KURI BETE-BETE
1988	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	Lepa-Lepayya
1989	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	MANDIRI
1990	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	PANTAI BIRU
1991	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	PASIR PUTIH
1992	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	Rajungan Kuri Lestari
1993	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	SAMUDERA JAYA KURI
1994	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	SAMUDRA PAJALAYYA
1995	Sulawesi Selatan	Maros	Marusu	Nisombalia	SINAR JARING
1996	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	SIPAKAINGA
1997	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	SINAR AENG BATU-BATU
1998	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PUTRA KAMASE
1999	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PUTRA BAHARI
2000	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	PABBIRING KASSI
2001	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	KELAUTAN BIRU
2002	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	INA SAKINA
2003	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	CAHAYA KARAMA
2004	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	BATU BERLIAN
2005	Sulawesi Selatan	Takalar	Galesong Utara	Aeng Towa	Aeng Towa
2006	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Tarowang	Balang Baru	Pesisir Sepe
2007	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Tarowang	Balang Baru	Bombang Sepe
2008	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Tarowang	Balangloe Tarowang	Rajawali
2009	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Tarowang	BALANGLOE TAROWANG	BONTOWA JAYA
2010	Sulawesi Selatan	Bulukumba	UJUNG BULU	bENTENGE	TITIPAN ILAHI

**DAFTAR KELOMPOK USAHA KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TAHUN 2025**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KUB
2468	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang III	Very Indah
2469	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin II .	Sungsang III	Berkah Rahmat
2470	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang III	Ilham
2471	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang III	Suryani
2472	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang 3	Putra Nelayan
2473	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Msi	Suka Maju
2474	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi	Serasan
2475	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi	Jiwa Nelayan
2476	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi	Berkat Bersama
2477	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi	Barokah
2478	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi Timur	Usaha Nelayan
2479	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Arisan Musi Timur	Maju Sejahtera
2480	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Gedung Buruk	Jati Makmur
2481	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	GEDUNG BURUK	CITRA MUSI
2482	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	HARAPAN MULIA	SUNGAI BAUNG
2483	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Kayu Ara Batu	Nelayan Bersama
2484	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	Warkuk Ranau Selatan	Kota Batu	Sejawa
2485	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	Warkuk Ranau Selatan	Kota Batu	Beguyor
2486	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Kuala Sungai Jeruju	Tirta Usaha
2487	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Leban	Leban Jaya
2488	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Tulung Selapan	Simpang Tiga Makmur	Samudera Biru
2489	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Sungai Lumpur	Teladan Desa
2490	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Sungai Lumpur	Pari
2491	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Sungai Lumpur	Pantai Biru
2492	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Sungai Lumpur	Pada Idi
2493	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal	Sungai Lumpur	Naga Laut
2494	Sumatera Selatan	Muara Enim	Muara Belida	Tanjung Baru	Jaya Makmur
2495	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	Warkuk Ranau Selatan	Way Wangi Seminung	Teluk Jaya
2496	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin 1	Pematang Palas	Nelayan Jaya
2497	Sumatera Utara	Batubara	Tanjung Tiram	Bandar Rahmat	NELAYAN MUARA PESISIR
2498	Sumatera Utara	Nias Utara	Lahewa	Pasar Lahewa	NELAYAN PEDULI
2499	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Bagan Kuala	PUTRA NELAYAN
2500	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Bagan Kuala	NELAYAN SEPAKAT
2501	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Bagan Kuala	NELAYAN MEKAR
2502	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Bagan Kuala	NELAYAN BAKTI KUALA
2503	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Bagan Kuala	HARAPAN NELAYAN
2504	SUMATERA UTARA	LANGKAT	Gebang	Dogang	Nelayan Harapan Dogang
2505	Yogyakarta	Bantul	Srandakan	Poncosari	Maju Mandiri

- b. SK1 Pengelolaan Kenelayan maju dan berdaya saing IKU 2 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya.

PERSENTASE NELAYAN YANG TERFASILTASI PENGEMBANGAN USAHANYA					
IKU	Jumlah Capaian	Konversi KUB	Keterangan		
Pendanaan	925	92	asumsi 1 KUB = 10 orang/Nelayan ->		
Diversifikasi	721	72	asumsi 1 Koperasi = 10 KUB		
FND	721	NF	1,03	+	1,23
FNP	925		2		x 100
TFND	700		= 1,13	x	100
TFNP	750		= 113		

FORMULA PERHITUNGAN

$$NF = \left(\frac{\left(\frac{FND}{TFND} \right) + \left(\frac{FNP}{TFNP} \right)}{2} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

NF	: Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya
FND	: Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas pengembangan diversifikasi usaha
TFND	: Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas pengembangan diversifikasi usaha TA 2025 (700 orang)
FNP	: Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas pendanaan usaha nelayan
TFNP	: Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas pendanaan usaha nelayan TA 2025 (750 orang)

Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan		
No.	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Morotai, Maluku	30
2	Cirebon, Jawa Barta (Hybrid)	371
3	Bantul, DIY	100
4	Bulukumba, Sulawesi Selatan	100
5	Lampung Selatan, Lampung	120
TOTAL		721

Fasilitasi Pembiayaan Usaha Nelayan		
No.	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Business Matching BI	61
2	Cirebon, Jawa Barta (Hybrid)	504
3	Bantul, DIY	110
4	Bulukumba, Sulawesi Selatan	110
5	Lampung Selatan, Lampung	140
TOTAL		925

- c. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing IKU 3 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

NO.	PROVINSI - KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN HASIL IDENTIFIKASI 2025
JUMLAH CAPAIAN		1857
I	SUMATERA BARAT	0
1	Kab. Pasaman Barat	
2	Kab. Pesisir Selatan	
3	Kab. Padang Pariaman	
II	LAMPUNG	0
4	Kab. Pesisir Barat	
5	Kab. Lampung Barat	
6	Kab. Mesuji	
III	JAWA BARAT	1817
7	Kab. Cirebon	0
8	Kab. Indramayu	1000
9	Kab. Sukabumi	245
10	Kab. Cianjur	300
11	Kab. Garut	0
12	Kab. Tasikmalaya	80
13	Kab. Pangandaran	92
14	Kab. Subang	100
15		
IV	JAWA TENGAH	0
14	Kab. Brebes	
15	Kab. Pemalang	
V	JAWA TIMUR	200
16	Kab. Situbondo	
17	Kab. Banyuwangi	
18	Kab. Tuban	
19	Kab. Sumenep	200
20	Kab. Sidoarjo	
VI	NUSA TENGGARA BARAT	45
21	Kab. Bima	
22	Kab. Dompu	45
VII	SULAWESI SELATAN	171
23	Kab. Takalar	171
24	Kab. Kepulauan Selayar	
25	Kab. Bulukumba	
26	Kab. Barru	
27	Kab. Bone	
28	Kab. Luwu Utara	
29	Kab. Luwu	
VIII	SULAWESI TENGAH	50
30	Kab. Toli-Toli	
31	Kab. Banggai	
32	Kab. Banggai Kepulauan	
33	Kab. Buol	
34	Kota Palu	
35	Kab. Tojo Una-Una	50
36	Kab. Poso	
37	Kab. Morowali Utara	
38	Kab. Banggai Laut	
39	Kab. Parigi Moutong	
40	Kab. Donggala	
41	Kab. Morowali	
IX	KALIMANTAN SELATAN	0
42	Kab. Kotabaru	
43	Kab. Tanah Bumbu	
44	Kab. Tanah Laut	
45	Kab. Barito Kuala	
46	Kab. Banjar	
47	Kab. Hulu Sungai Selatan	
48	Kab. Hulu Sungai Utara	
X	KALIMANTAN TIMUR	0
49	Kab. Kutai Kartanegara	
XI	GORONTALO	0
50	Kab. Boalemo	
51	Kab. Gorontalo	
52	Kab. Pohuwato	
TOTAL		2283

- d. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing IKU 4 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya

Tahap I

Proses pembangunan fisik

NO	DESA/KELURAHAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	Anaiwoti	Kolaka	Sulawesi Tenggara
2	Sonui Jaya	Konawe	Sulawesi Tenggara
3	Gelwang Mukar	Cinibon	Jawa Barat
4	Banagien	Toli Toli	Sulawesi Tengah
5	Cikinhwatan	Pandaglang	Banten
6	Sungai Nyirih	Sembas	Kalimantan Barat
7	Bandar Agung	Lampung Selatan	Lampung
8	Jatimalang	Purworejo	Jawa Tengah
9	Kartajaya	Purworejo	Jawa Tengah
10	Banyuworo	Pati	Jawa Tengah
11	Karangduwur	Kebumen	Jawa Tengah
12	Wanureh	Cianjur	Jawa Barat
13	Tanjung Putri	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
14	Ciwana	Sukabumi	Jawa Barat
15	Uluh Pawoh	Acéh Barat Daya	Acéh
16	Lalotawi	Kota Tual	Maluku
17	Bumiharjo	Jepara	Jawa Tengah
18	Selama	Kupang	Nusa Tenggara Timur
19	Balanghwa Tarawang	Jempit	Sulawesi Selatan
20	Sungai W	Banyuwangi	Sumatera Selatan
21	Lalang	Banyuwangi	Jawa Timur
22	Supa	Malakana Utara	Maluku Utara
23	Umba	Kota Meksar	Sulawesi Selatan
24	Seraya Timur	Karangasem	Bali
25	Leato Selatan	Kota Gorontalo	Gorontalo
26	Wadilwang	Buru	Maluku
27	Tongko-Tongko	Sinjai	Sulawesi Selatan
28	Dapandia	Sumenep	Jawa Timur
29	Kuala Raja	Bintulu	Acéh
30	Wamman	Raja Ampat	Papua Barat Daya
31	Tanapung	Bombana	Sulawesi Tenggara
32	Bulumburo	Tuban	Jawa Timur
33	Pemecari	Bantul	DI Yogyakarta
34	Malalanda	Baten Utara	Sulawesi Tenggara
35	Bambangga	Bulukumba	Sulawesi Selatan
36	Karangjati	Gorut	Jawa Barat
37	Adang	Aceh	Nusa Tenggara Timur
38	Sangawa Timur	Pulau Morotai	Maluku Utara
39	Kalapang	Lampung Selatan	Lampung
40	Aeng Batu Batu	Takalar	Sulawesi Selatan
41	Pujiharjo	Malang	Jawa Timur
42	Babana	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
43	Pirago I, Seluma	Seluma	Bangka
44	Karangjati	Pangandaran	Jawa Barat
45	Mopas	Kaur	Bangka
46	Elas Buana	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
47	Sembulang	Kota Batam	Kepulauan Riau
48	Mudakagaba	Flora Timur	Nusa Tenggara Timur
49	Pulau Bungin	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
50	Bilalanda	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
51	Wahoka	Flora Timur	Nusa Tenggara Timur
52	Sumari	Mamuju	Sulawesi Barat
53	Margasari	Lampung Timur	Lampung
54	Angkur	Bone	Sulawesi Selatan
55	Wasilho	Malakana Timur	Maluku Utara
56	Ujung Sadi	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
57	Kalapang	Padang Panjang	Sumatera Barat
58	Padang Sari	Kota Padang	Sumatera Barat
59	Sukohayu	Lampung Timur	Lampung
60	Golak Makmur	Baten Selatan	Sulawesi Tenggara
61	Sekam Raya	Kota Batam	Kepulauan Riau
62	Karu	Kota Batam	Kepulauan Riau
63	Lancok	Acéh Utara	Acéh
64	Sinkai	Minako	Papua Selatan
65	Biram Puntong	Kota Langsa	Acéh

Tahap II

Proses Penandatanganan kontrak

No	Desa/Kelurahan	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Ghone Balano	Muna	Sulawesi Tenggara
2	Kahyapu	Bengkulu Utara	Bengkulu
3	Lamu	Gorontalo	Gorontalo
4	Pentadu Barat	Boalemo	Gorontalo
5	Mootinelo	Bone Bolango	Gorontalo
6	Bunyu Selatan	Bulungan	Kalimantan Utara
7	Sungai Padang	Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
8	Tukak	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
9	Cemaga Utara	Natuna	Kepulauan Riau
10	Tegineneng	Tanggamus	Lampung
11	Cabang	Lampung Tengah	Lampung
12	Kunjir	Lampung Selatan	Lampung
13	Durian	Pesawaran	Lampung
14	Maitara Tengah	Tidore Kepulauan	Maluku Utara
15	Bajo	Kepulauan Sula	Maluku Utara
16	Labuhan Sangoro	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
17	Jala	Dompu	Nusa Tenggara Barat
18	Bintaro	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
19	Kamalapati	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
20	Kebirangga	Ende	Nusa Tenggara Timur
21	Kaye	Asmat	Papua Selatan
22	Pambang Pesisir	Bengkalis	Riau
23	Baurung	Majene	Sulawesi Barat
24	Bambakoro	Pasang Kayu	Sulawesi Barat
25	Nisombalia	Maros	Sulawesi Selatan
26	Tanete	Barru	Sulawesi Selatan
27	Bolano Tengah	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
28	Labuan	Poso	Sulawesi Tengah
29	Kalumbatan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
30	Kalupapi	Banggai Laut	Sulawesi Tengah
31	Momalia II	Bolaang Mangondow Selatan	Sulawesi Utara
32	Bagan Kuala	Serdang Bedagai	Sumatera Utara
33	Pematang Sei Baru	Asahan	Sumatera Utara
34	Perupuk	Batu Bara	Sumatera Utara
35	Kwala Gebang	Langkat	Sumatera Utara

- e. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing IKU 5 Persentase nelayan yang terlindungi.

FORMULA PERHITUNGAN		Persentase nelayan yang terlindungi $= (FPU/TFPU) \times 100 \%$	
KETERANGAN		FPU : Jumlah Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan TFPU : Jumlah Nelayan yang ditargetkan teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan (50.000)	
	FPU :	63.642	
	TFPU :	50.000	
Persentase nelayan yang terlindungi		$= (63.642 / 50.000) \times 100$ $= 1,27284 \times 100$ $= 127,284$ $= 127,3$	

(

Tabel Data Validasi

10

Tambah Kolom

	AKSI	NAMA	NO KUSUKA	PROVINSI KTP	KABUPATEN KTP	Kecamatan KTP	Desa KTP	JENIS USAHA	JENIS PE
☐	☐	MUH. SUPRATMAN	7317022311840002	SULAWESI SELATAN	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	JUMARDI	7313100701860003	SULAWESI SELATAN	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	IKMAL HIDAYAT	7317020103070002	SULAWESI SELATAN	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	FARID JULIET SANDRA NEGARA	7308210108840001	SULAWESI SELATAN	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	BASO	7371111303850005	SULAWESI SELATAN	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	SOMAD	3320060204770007	JAWA TENGAH	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	KASMAN	3320060307720002	JAWA TENGAH	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	DIAN SANTOSO	3320061707940004	JAWA TENGAH	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	SLAMET ANWAR	3320062203570001	JAWA TENGAH	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	Penangkapan Ikan di Laut	-
☐	☐	MUHAMMAD IRGI FEBRIYANSYAH	3320061102070001	JAWA TENGAH	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	Penangkapan Ikan di Laut	-
Total Data: 63.642 1 2									
Valid		Tolak							

- f. SK2 Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha, IKU 6 Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)

KELEMBAGAAN EKONOMI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN (Lembaga)

FORMULA PERHITUNGAN

$$\Sigma KN = KN_{(1)} + KN_{(2)} + \dots KN_{(n)}$$

Keterangan:

ΣKN = Jumlah Kelembagaan usaha nelayan yang terfasilitasi pengembangan dan pembinaan kapasitas kelembagaan

$KN_{(n)}$ = Kelembagaan usaha nelayan yang difasilitasi pengembangan dan pembinaan kapasitas kelembagaan

No	Kelembagaan	Keterangan Nomor Badan Hukum :
1	Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja	AHU-0012153.AH.01.29.TAHUN 2025
2	Koperasi Desa Merah Putih Warloka	AHU-0019864.AH.01.29.TAHUN 2025
3	Koperasi Desa Merah PuOh Sorue Jaya	AHU-0033253.AH.01.29.TAHUN 2025
4	Koperasi Desa Merah PuOh Lateng	AHU-0017601.AH.01.29.TAHUN 2025

- g. SK3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, IKU 7. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Indeks)



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	91	22.86	91.44 %	29.63	74.08 %	25.44	84.8 %	4.97	99.4 %	82.9	TINGGI
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	54	22.59	90.36 %	28.69	71.73 %	25.56	85.2 %	4.94	98.8 %	81.78	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	65	23.69	94.76 %	30.47	76.17 %	27.46	91.53 %	5	100 %	86.62	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	69	23.41	93.64 %	30.71	76.78 %	25.58	85.27 %	5	100 %	84.69	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	35	22.86	91.44 %	31.06	77.65 %	26.43	88.1 %	4.91	98.2 %	85.26	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	71	22.89	91.56 %	33.85	84.63 %	26.69	88.97 %	5	100 %	88.42	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	37	23.51	94.04 %	26.7	66.75 %	26.22	87.4 %	4.92	98.4 %	81.34	TINGGI

- h. SK2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, IKU 8. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
NOTA DINAS NOMOR 2424/DJPT.1/RC.610/IX/2025	
Yth.	1. Para Direktur lingkup DJPT 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPT
Dari	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Hal	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025
Lampiran	-
Tanggal	29 September 2025
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai sarana pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:	
1. Pembahasan lanjutan PM SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui Forum Pengelolaan Kinerja pada tanggal 17 s.d. 19 September 2025. Penilaian mandiri dimaksud bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan di setiap unit kerja, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan;	
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP untuk seluruh unit kerja instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
3. Dalam rangka evaluasi SAKIP tersebut, telah dilakukan pembahasan lanjutan, serta verifikasi Penilaian Mandiri (PM) SAKIP pada 6 satker Pusat dan 23 satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui pendampingan Tim Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil verifikasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:	

No.	Satker	Komponen				Nilai	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
1	Sekretariat	27.60	26.10	12.15	23.00	88.85	A
2	DL PSDI	27.60	26.10	13.80	23.00	80.50	AA
3	DL KAPI	30.00	30.00	15.00	21.25	96.25	AA
4	DL KP	27.60	27.00	13.80	23.00	91.40	AA
5	DL UPI	27.60	27.60	12.60	22.50	90.30	AA
6	DL PPN	27.60	27.60	11.85	22.50	89.55	A
7	BBPI Semarang	24.60	27.60	13.80	23.00	89.00	A
8	PPS Nizan Zachman	25.80	27.60	12.75	22.25	88.40	A
9	PPS Kendari	27.60	24.60	12.30	24.25	88.75	A
10	PPS Cilacap	30.00	30.00	15.00	25.00	100	AA
11	PPS Bungas	27.00	27.00	13.50	22.50	90.00	A
12	PPS Belawan	25.50	25.50	14.25	23.00	88.25	A
13	PPS Bitung	27.60	26.10	13.05	21.75	88.50	A
14	PPN Ambon	27.00	27.00	12.00	22.50	88.50	A
15	PPN Palabuhanratu	27.60	27.60	13.80	20.50	89.50	A
16	PPN Ternate	27.60	26.10	13.05	22.50	89.50	A
17	PPN Pigi	26.70	27.60	13.80	20.50	88.60	A
18	PPN Pemangkat	25.80	27.60	13.80	22.50	89.70	A
19	PPN Sibolga	27.60	24.00	13.80	23.00	88.40	A
20	PPN Tual	27.60	27.60	12.60	21.00	88.80	A
21	PPN Kojawanan	27.60	26.70	12.60	21.75	88.65	A
22	PPN Pekalongan	26.10	26.10	13.80	23.00	89.00	A
23	PPN Brondong	27.60	27.60	13.50	20.50	89.20	A
24	PPN Tanjung Pandan	27.60	27.60	13.80	20.50	89.50	A
25	PPN Sungailiat	26.70	27.00	12.60	22.00	88.30	A
26	PPN Pengambengan	27.60	27.60	13.50	20.00	88.70	A
27	PPN Karangantu	27.60	27.60	13.80	20.75	89.75	A
28	PPN Kawandang	25.80	27.60	13.35	22.50	89.25	A
29	PPP Teluk Batang	27.60	27.00	13.50	21.75	89.85	A

Rincian hasil verifikasi PM SAKIP seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/LampiranPMSAKIPDJPT2025>.

4. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

a. **Perencanaan Kinerja**

Seluruh satker telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART) dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat kekurangan berupa dokumen Rencana Strategis Ditjen Perikanan Tangkap periode 2025-2029 yang masih dalam bentuk rancangan (draft) serta perlu penyempurnaan pada pohon kinerja dengan memberikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang (crosscutting). Di beberapa satker sudah terdapat upaya yang patut dihargai dalam

Dokumen ini telah dimuat secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- i. SK2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, IKU 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Persen)

PERHITUNGAN IKU 2024					JML REKOM	TL REKOM	%				2					
IKU TW III					OKTOBER 2024 - JUNI 2025			2	-	0,00%						
					1	2	-	1	-	-	1	-	-			
No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket		
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
OKTOBER 2024																
NOVEMBER 2024																
DESEMBER 2024																
JANUARI 2025																
FEBRUARI 2025																
MARET 2025																
MEI 2025																
JULI 2025																
AGUSTUS 2025																
SEPTEMBER 2025																
52	Reviu	DIT PPN	T.409/IT/12/HP.380/IX/2025	Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2025	1	2	-	1	-	-	1	-	-	PENDING		

- j. SK2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, IKU 10 Presentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)

Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Sekarang	Realisasi	Prosentase Realisasi
	Anggaran Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	6.629.850.000,00	1.121.311.554.000	1.003.834.884.470	90
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		984.129.000	893.270.230	91
QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya		336.000.000	268.818.935	
QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya		248.649.000	227.247.295	
QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya		399.480.000	397.204.000	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		502.620.000	394.351.313	
QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas		266.160.000	259.250.000	
QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat		236.460.000	135.101.313	
QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat		1.120.006.853.000	1.002.707.144.314,00	90
QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya		1.120.006.853.000	1.002.707.144.314,00	
QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		320.572.000	234.469.926	73
QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan		320.572.000	234.469.926	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahrus**

Jabatan : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan


Mahrus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pengelolaan Kenelayanan Maju dan Berdaya Saing	1	Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45
		2	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100
		3	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	5.000
		4	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	100
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	6	Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan (lembaga)	4
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	87
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1.125.051.054.000,-
Total Anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2025		1.125.051.054.000,-

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan


Mahrus